

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN 2012 - 2016 KABUPATEN SAMOSIR



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SAMOSIR
BPS-Statistics of Samosir Regency**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN 2012 - 2016 KABUPATEN SAMOSIR



Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir 2012-2016

ISBN : 978-602-6860-31-6
No. Publikasi : 12170.1703
Katalog : 9302020.1217
Ukuran Buku : 21 X 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 92 halaman

Tim Penyusun : Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
Tim Penyunting : Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
Diterbitkan oleh : ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
Dicetak oleh : CV. Rilis Grafika

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pangururan, September 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Samosir



Ir. Rudy Harlon Harianja

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	21
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	24
2.5 Perubahan Inventori	29
2.6 Ekspor - Impor	33
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SAMOSIR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN SAMOSIR 2012-2016	35
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Samosir Menurut Pengeluaran	37
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	42
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	47
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	48
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	51
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	53
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	55
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	56
3.9 Perkembangan Net Ekspor antar daerah	58

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SAMOSIR 2012-2016	61
4.1	PDRB (Nominal).....	63
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	65
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	66
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	66
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	67
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	68
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	69
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	70
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	71
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	72
	PENUTUP	75
	LAMPIRAN	79
	DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012-2016	38
Tabel 3.2. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012-2016	39
Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012-2016.....	40
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012-2016	41
Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016	42
Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Samosir, 2012-2016	43
Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Samosir, 2012-2016	45
Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Samosir, 2012-2016	46
Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Samosir, 2012-2016	47
Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRRT Kabupaten Samosir, 2012-2016	48
Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Samosir, 2012-2016	49
Tabel 3.12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Samosir, 2012-2016.....	51
Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Samosir, 2012-2016	54
Tabel 3.14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Samosir, 2012-2016	55
Tabel 3.15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Samosir, 2012-2016	57

Tabel 4.1	PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Samosir, 2012-2016	64
Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Kabupaten Samosir Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor 2012-2016	65
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Samosir 2012-2016	66
Tabel 4.4	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Samosir, 2012-2016	67
Tabel 4.5	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Samosir 2012-2016	68
Tabel 4.6	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Samosir 2012-2016.....	68
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Samosir, 2012-2016	69
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Samosir 2012-2016	71
Tabel 4.9	Rasio Perdagangan Internasional, Kabupaten Samosir, 2012-2016.....	72
Tabel 4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Kabupaten Samosir, 2012-2016.....	73

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012 - 2016	39
Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Kabupaten Samosir, 2012 - 2016	53
Grafik 3.3. Perbandingan Perubahan Inventori ADHB dan ADHK 2010, Kabupaten Samosir, 2012 - 2016	55
Grafik 3.4. Perkembangan Impor Barang dan Jasa ADHB Kabupaten Samosir, 2012 - 2016	58

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012 - 2016	81
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012 - 2016	82
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012 - 2016	83
Lampiran 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012 - 2016.....	84
Lampiran 5	Indeks Implisit PDRB, Kabupaten Samosir 2012 - 2016	85
Lampiran 6	Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012 - 2016	86
Lampiran 7	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012 - 2016	87
Lampiran 8	Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012 - 2016.....	88

BAB I
PENDAHULUAN

<http://samosirkab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah

konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>) Bruto	= Pembentukan Modal Tetap
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan $GFCF$ serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar daerah dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi,

dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

-
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
- Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<http://samosirkab.bps.go.id>

BAB II
METODE ESTIMASI DAN
SUMBER DATA

<http://samosirkab.bps.go.id>

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;

-
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
 7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

<http://samosirkab.bps.go.id>

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang

dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;

-
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
 4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
 5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
 6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun

percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi.

j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK 2010, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK 2010.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK 2010 dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK 2010 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK 2010 tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK 2010 di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor

kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB ADHK 2010 adalah dengan cara men“deflate” PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan

pendanaan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pendanaan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama

adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori ADHK 2010, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan *menginflate* perubahan inventori *adh Konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK 2010 dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Import Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Import barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-import jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-import tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN SAMOSIR
BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN
KABUPATEN SAMOSIR, 2012 – 2016

<http://samosirkab.go.id>

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN SAMOSIR MENURUT PENGELUARAN

Struktur ekonomi Kabupaten Samosir sebagai akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012-2016 tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Samosir digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kajian atau analisis terhadap komponen PDRB, yaitu : konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT dan Pemerintah); Investasi (PMTB dan Inventori), dan net ekspor (ekspor dikurangi impor) bukan hanya dari arah perkembangan struktur, tetapi juga dari sisi pertumbuhan. Dalam analisis ekonomi makro, ketujuh komponen tersebut juga sering digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi atau prediksi perekonomian. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

**Tabel 3.1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Samosir, 2012-2016**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015*) (5)	2016**) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.310,09	1.464,20	1.640,04	1.852,96	2.091,86
2. Konsumsi LNPRT	52,43	58,43	66,50	72,16	79,29
3. Konsumsi Pemerintah	580,57	619,67	682,09	760,91	808,85
4. PMTB	340,66	388,63	452,07	479,09	515,17
5. Perubahan Inventori	133,86	135,87	150,87	153,66	155,51
6. Ekspor	666,84	763,19	875,59	897,70	895,38
7. Impor	798,58	883,22	1.029,09	1.072,66	1.103,08
Total PDRB	2.285,89	2.546,77	2.838,07	3.143,84	3.442,97

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada tabel 3.1, nilai PDRB Samosir ADHB selama periode tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK 2010, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

**Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir
2012-2016**

(Miliar Rp)

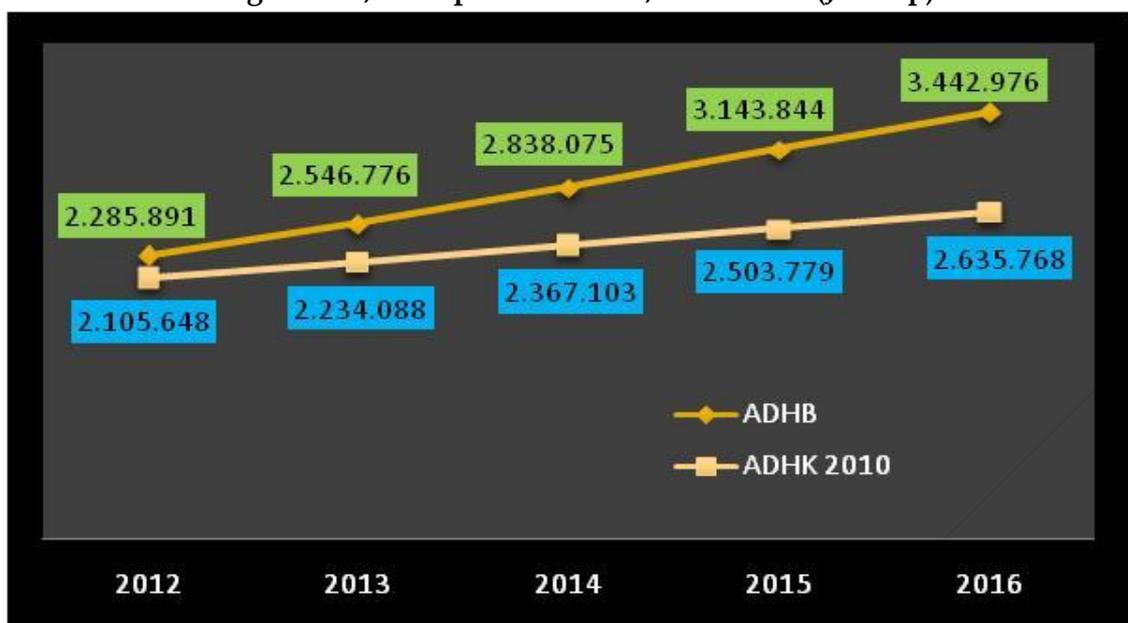
Komponen Pengeluaran (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015*) (5)	2016**) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.187,54	1.251,40	1.321,13	1.393,01	1.466,86
2. Konsumsi LNPRT	49,28	53,58	56,96	57,90	60,09
3. Konsumsi Pemerintah	520,13	533,31	549,28	584,00	594,91
4. PMTB	316,30	336,96	349,55	361,42	372,69
5. Perubahan Inventori	132,11	133,45	149,90	152,07	153,26
6. Ekspor	629,97	684,06	715,90	704,69	689,48
7. Impor	729,68	758,66	775,62	749,31	701,54
Total PDRB	2.105,65	2.234,09	2.367,10	2.503,78	2.635,77

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu 2012–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Samosir berdasarkan PDRB ADHK 2010 dapat dilihat pada tabel 3.2. Sama halnya dengan PDRB ADHB, nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 3.1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir, 2012 - 2016 (Juta Rp)



Pada grafik 3.1 terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPR (PK-LNPR), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir
2012 – 2016**

(persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015*) (5)	2016**) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	57,31	57,49	57,79	58,94	60,76
2. Konsumsi LNPR	2,29	2,29	2,34	2,30	2,30
3. Konsumsi Pemerintah	25,40	24,33	24,03	24,20	23,49
4. PMTB	14,90	15,26	15,93	15,24	14,96
5. Perubahan Inventori	5,86	5,34	5,32	4,89	4,52
6. Ekspor	29,17	29,97	30,85	28,55	26,01
7. Impor	34,94	34,68	36,26	34,12	32,04
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2012-2016, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 57-60%. Ekspor mempunyai peran yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan impor, karena sekitar 26 - 30% produk Kabupaten Samosir mampu menembus kabupaten/ kota lain seperti Pematang Siantar, Medan, Karo dan lainnya.

Dari sisi impor, sekitar 32-36% permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) mempunyai peranan relatif kecil dengan kontribusi sekitar 14-15%. Proporsi konsumsi akhir

pemerintah berada pada kisaran 23-25%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Di sisi lain, pada tahun 2012-2016 perdagangan antar daerah Kabupaten Samosir yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor cenderung sedikit lebih tinggi dari nilai ekspor. Kecenderungan perdagangan antar daerah Kabupaten Samosir dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi defisit atau kekurangan yang berarti bahwa pemenuhan kebutuhan/ persediaan di Samosir masih harus melakukan impor dari daerah lain.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,10%, sebaliknya terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,27%.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Samosir 2012–2016

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,23	5,38	5,57	5,44	5,30
2. Konsumsi LNPRT	5,23	8,72	6,30	1,66	3,78
3. Konsumsi Pemerintah	5,77	2,53	3,00	6,32	1,87
4. PMTB	6,70	6,53	3,74	3,40	3,12
5. Perubahan Inventori	68,48	1,02	12,33	1,44	0,79
6. Ekspor	-1,29	8,59	4,66	-1,57	-2,16
7. Impor	5,05	3,97	2,24	-3,39	-6,38
Total PDRB	6,05	6,10	5,95	5,77	5,27

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan

¹ Indeks perkembangan

luar daerah) juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	110,32	117,01	124,14	133,02	142,61
2. Konsumsi LNPRT	106,40	109,05	116,77	124,61	131,94
3. Konsumsi Pemerintah	111,62	116,19	124,18	130,29	135,96
4. PMTB	107,70	115,34	129,33	132,56	138,23
5. Perubahan Inventori	101,33	101,81	100,64	101,05	101,47
6. Ekspor	105,85	111,57	122,31	127,39	129,86
7. Impor	109,44	116,42	132,68	143,15	157,24
Total PDRB	108,56	114,00	119,90	125,56	130,63

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Pada tabel 3.6 tercermin bahwa dalam kurun waktu 2012-2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK 2010), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2012-2016 cukup berfluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 60,74% dan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 57,31%.

Pasca krisis ekonomi tahun 1998/1999 atau masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan

perilaku dan kebiasaan konsumsinya. Peningkatan penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor), juga turut mendorong meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Samosir, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (MiliarRp)	1.310,09	1.464,20	1.640,04	1.852,96	2.091,86
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.187,54	1.251,39	1.321,12	1.392,96	1.466,86
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	57,31	57,49	57,79	58,94	60,74
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	44,54	49,44	55,11	62,10	69,71
b. ADHK 2010	40,38	42,26	44,39	46,69	48,88
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	10,77	11,96	13,33	14,97	16,80
b. ADHK 2010	9,76	10,22	10,73	11,25	11,78
Pertumbuhan²					
a. Total konsumsi RT	5,23	5,38	5,57	5,44	5,30
b. Per-RT	4,54	4,66	5,04	5,17	4,71
c. Perkapita	4,54	4,66	5,04	4,82	4,70
Jumlah RT (unit)	29.408	29.610	29.759	29.837	30.007
Jumlah penduduk (org)	121.613	122.449	123.065	123.789	124.496

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Berdasarkan PDRB ADHB, pada tahun 2012 secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Samosir menghabiskan dana sekitar 44,54 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang,

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 49,44 juta rupiah (2013); 55,11 juta rupiah (2014); 62,10 juta rupiah (2015); dan menjadi 69,71 juta rupiah (2016).

Sementara itu, berdasarkan PDRB ADHK 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga selama periode 2012-2016 tumbuh pada kisaran 4-5%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,17%. Pada sisi lain, rata-rata pertumbuhan konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Samosir meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 4-5%. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK 2010 sebesar 5,23% pada tahun 2012. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 5,38% dan 5,57% pada tahun 2014. Selanjutnya konsumsi rumah tangga cenderung melambat hingga tahun 2016 sebesar 5,30%. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1%. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Samosir, 2012 – 2016³

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	56,33	55,68	55,52	55,94	56,33
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,73	3,76	3,74	3,75	3,75
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,12	11,63	12,24	12,06	11,88
d. Kesehatan & Pendidikan	6,71	7,15	7,10	6,93	6,77
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	14,25	13,98	13,93	13,88	13,85
f. Hotel dan Restoran	6,00	5,84	5,52	5,53	5,54
g. Lainnya	1,87	1,97	1,95	1,91	1,88
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kontribusi konsumsi bukan makanan terhadap total konsumsi lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan selama periode tersebut cenderung stabil, yaitu 56,33 % (2012) ; 55,68% (2013) ; 55,52% (2014) ; 55,94% (2015) dan 56,33% (2016).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Samosir, 2012 – 2016

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,23	9,72	11,13	13,55	13,03
b. Pakaian dan Alas Kaki	10,88	12,03	10,92	12,77	12,42
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,34	16,03	17,31	11,00	10,63
d. Kesehatan & Pendidikan	13,90	18,32	10,68	10,02	9,69
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	9,03	8,93	11,04	12,30	11,98
f. Hotel dan Restoran	17,49	8,03	5,47	12,82	12,48
g. Lainnya	14,92	16,71	10,34	10,48	10,15

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Pada tahun 2012 sebesar 8,23% meningkat menjadi 9,72% (2013), 11,13% (2014) dan 13,33% (2015). Namun pada tahun 2016 sedikit melambat yaitu sebesar 13,03%. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Pada 2012 laju pertumbuhan yang dominan pada sub kelompok hotel dan restoran yaitu 17,49%. Tahun berikutnya 2013, laju pertumbuhan sub kelompok kesehatan dan pendidikan mendominasi konsumsi rumah tangga sebesar 18,32%. Selanjutnya, tahun 2014 laju pertumbuhan didominasi oleh sub kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga dengan nilai 17,31%. Sedangkan tahun 2015 didominasi oleh sub kelompok makanan, minuman, dan rokok sebesar 13,55%. Dan pada tahun 2016, dengan nilai sebesar 13,03% sub kelompok makanan, minuman, dan rokok masih tetap mendominasi.

**Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran
Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Samosir, 2012 – 2016⁴**

Kelompok Konsumsi	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,55	4,70	4,97	7,31	7,39
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,52	3,44	2,95	5,43	7,20
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,18	14,16	15,78	10,48	9,65
d. Kesehatan & Pendidikan	11,58	13,11	4,61	2,21	2,18
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	2,80	2,80	6,60	7,49	7,72
f. Hotel dan Restoran	12,01	4,48	2,14	6,57	6,57
g. Lainnya	9,48	11,50	5,80	8,56	8,56

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tingkat pertumbuhan secara implisit disajikan pada tabel 3.9. Pada periode 2012-2016, kelompok makanan, minuman dan rokok; pakaian dan alas kaki; transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya, kelompok kesehatan dan pendidikan terus melambat, pada tahun 2012 sebesar 11,58% menjadi 2,18 pada tahun 2016. Sedangkan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; Hotel dan Restoran; Lainnya relatif stabil pada dua tahun terakhir.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB yang kecil.

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

**Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Kabupaten Samosir, 2012 – 2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	52,43	58,43	66,50	72,15	79,29
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	49,28	53,58	56,96	57,90	60,09
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,29	2,29	2,34	2,30	2,30
Pertumbuhan	5,23	8,72	6,30	1,66	3,78

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.10, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi LNPRT pada periode 2012-2016 mengalami peningkatan. Namun, proporsi terhadap PDRB Kabupaten Samosir senantiasa berada pada kisaran angka 2%. Proporsi yang tertinggi terjadi pada 2014 sebesar 2,34%. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pertumbuhan konsumsi LNPRT adalah pemilihan umum legislatif dan presiden.

Bila dilihat dari pendapatan riil, maka konsumsi LNPRT ADHK 2010 pada tahun 2012 sebesar 49,28 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 5,23% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, konsumsi LNPRT mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 8,72% atau sebesar 53,58 miliar rupiah. Pada tahun 2014 mengalami perlambatan menjadi 6,30%, dan terus mengalami perlambatan hingga tahun 2015 menjadi 1,66% atau sebesar 57,90 miliar rupiah. Pada tahun 2016 tumbuh kembali sebesar 3,78 persen atau menjadi 60,09 miliar rupiah.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Samosir serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Samosir, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	580,57	619,67	682,09	760,91	808,85
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	520,13	533,31	549,28	584,00	594,91
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,40	24,33	24,03	24,20	23,49
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	4,77	5,06	5,54	6,15	6,50
b. ADHK 2010	4,27	4,35	4,46	4,72	4,78
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	155,77	171,70	194,99	213,02	258,66
b. ADHK 2010	139,55	147,77	157,02	163,49	190,25
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	5,77	2,53	3,00	6,32	1,87
b. Konsumsi perkapita	5,07	1,83	2,48	5,70	1,29
c. Konsumsi per-pegawai	9,91	5,89	6,26	4,12	16,37
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	3.727	3.609	3.498	3.572	3.127
Jumlah penduduk (org)	121.613	122.449	123.065	123.789	124.496

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2012 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 580,57 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 808,85 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Selama periode 2012-2016, Kontribusi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Kontribusi terendah terjadi pada tahun

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

2016 sebesar 23,49%; sedangkan tertinggi pada tahun 2012 yang mencapai 25,40%. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2012 konsumsi pemerintah per-kapita ADHB sebesar 4,77 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini terlihat pada tabel 3.11.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADHK 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut mengidentifikasi adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2012 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 155,77 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik ADHB maupun ADHK 2010). Lain halnya dengan jumlah pegawai pemerintah mengalami perubahan yang berfluktuasi. Pada tahun 2012 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 3.727 orang, mengalami penurunan hingga tahun 2016 menjadi 3.127 orang. Dalam kurun waktu 2012-2016, secara total terjadi pengurangan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 600 orang atau turun sebesar 16,10 persen dari tahun 2012.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan seberapa besar pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 6,32%; untuk konsumsi per-kapita 5,70%; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,37%.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Selain itu dapat juga diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 3.12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Samosir, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	340,66	388,63	452,07	479,10	515,17
b. ADHK (Miliar Rp)	316,30	336,96	349,55	361,42	372,69
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	14,90	15,26	15,93	15,24	14,96
Struktur PMTB ⁸					
a. Bangunan (Miliar Rp)	307,93	349,97	408,06	429,99	460,36
(%)	90,39	90,05	90,27	89,75	89,36
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	32,73	38,65	44,00	49,11	54,81
(%)	9,61	9,95	9,73	10,25	10,64
Total PMTB (Miliar Rp)	340,66	388,63	452,07	479,10	515,17
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ⁹ (%)					
a. Bangunan	6,45	6,38	3,33	3,26	2,95
b. Non Bangunan	9,16	8,03	7,62	4,65	4,65
Total PMTB	6,70	6,53	3,74	3,40	3,12

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.12 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tumbuh melambat. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2013 mencapai besaran angka 6,70% dan terus melambat hingga tahun 2016 yaitu hanya sebesar 3,12%.

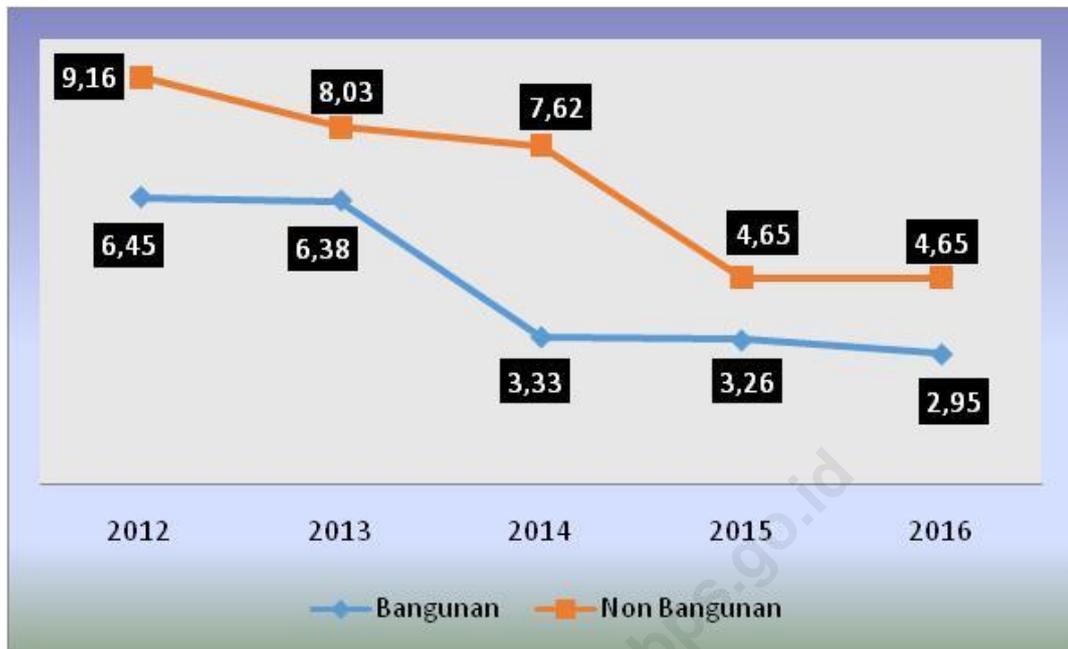
Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung menurun tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama tahun 2012-2016, seperti yang disajikan dalam tabel 3.12. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing komponen PMTB.

Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,45%. Selanjutnya, pada tahun 2013 hingga 2016, trend sub komponen ini senantiasa melambat. Pada tahun 2014 melambat dengan nilai 3,33%, tahun 2015 sebesar 3,26% dan tahun 2016 sebesar 2,95%

Sama halnya dengan sub komponen bangunan, sub komponen non bangunan juga melambat dalam rentang lima tahun terakhir. Pada tahun 2012, sub komponen ini tumbuh sebesar 9,16%, kemudian melambat pada tahun 2013 dengan nilai 8,03% dan 7,62% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 dan 2016 sub komponen non bangunan ini tumbuh stabil pada angka 4,65%.

Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB,
Kabupaten Samosir, 2012 – 2016
(Persen)



3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi.

Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Samosir, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	133,86	135,87	150,86	153,66	155,51
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	132,11	133,45	149,90	152,07	153,26
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	5,86	5,34	5,32	4,89	4,52

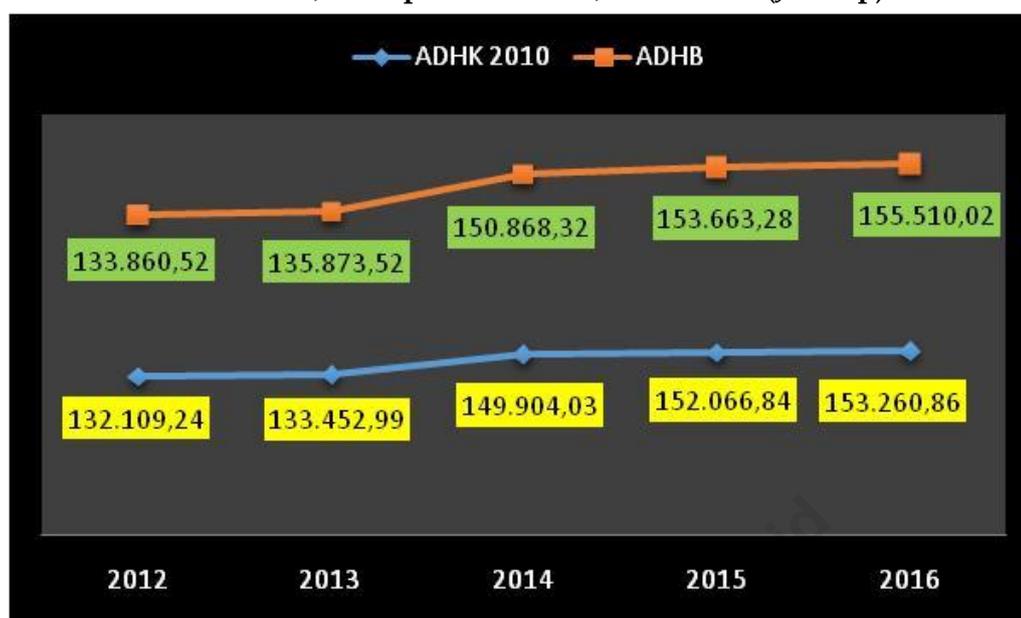
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2012 perubahan inventori sebesar 133,86 miliar rupiah atau menyumbang sebesar 5,86% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Samosir. Sedangkan tahun 2013 proporsinya sedikit menurun menjadi 5,34% atau sebesar 135,87 miliar rupiah. Pada tahun 2014 hingga 2016 proporsi nilai inventori terhadap PDRB senantiasa turun dengan nilai 5,32% , 4,89% dan 4,52% atau sebesar 150,86 miliar rupiah (2014), 153,66 miliar rupiah (2015) dan 155,51 miliar rupiah (2016)

Grafik 3.3 menggambarkan perubahan inventori ADHB dan ADHK 2010 periode 2012-2016.

Grafik 3.3. Perbandingan Perubahan Inventori ADHB dan ADHK 2010, Kabupaten Samosir, 2012 - 2016 (Juta Rp)



3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 3.14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Samosir, 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	666,84	763,19	875,59	897,70	895,38
b. ADHK (Miliar Rp)	629,97	684,06	715,90	704,69	689,48
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	29,17	29,97	30,85	28,55	26,01
Pertumbuhan ¹⁰					
Total Ekspor	-0,61	14,45	14,73	2,53	-0,26

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

¹⁰Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

PDRB Kabupaten Samosir Menurut Pengeluaran 2012-2016

Secara total, nilai ekspor tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 nilai ekspor Kabupaten Samosir mencapai 666,84 miliar rupiah meningkat hingga menjadi 895,38 miliar rupiah pada tahun 2016. Secara nominal nilai ekspor mengalami peningkatan, namun proporsinya dalam PDRB cenderung menurun walaupun tidak signifikan. Tahun 2012, proporsinya terhadap PDRB sebesar 29,17%. Pada tahun 2013 hingga 2016, proporsi nilai ekspor mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada dua tahun terakhir dengan nilai 28,55% dan 26,01%

Pertumbuhan riil total ekspor periode 2012-2016 mencapai angka tertinggi pada tahun 2014 dengan mencapai angka 14,73%. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang dan jasa. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekspor sebesar -0,61%. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 tumbuh secara signifikan dengan nilai 14,45% dan 14,73%. Pada tahun 2015 mengalami perlambatan dengan nilai sebesar 2,53% dan terus menurun dengan nilai -0,26 pada tahun 2016.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kabupaten Samosir terhadap ekonomi atau produk daerah Kabupaten/Kota lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai

produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Samosir di daerah lain, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Daerah penyumbang terbesar impor berasal dari Kota Medan dan Pematang Siantar. Didominasi oleh barang/produk jadi yang akan dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Samosir.

Tabel 3.15, Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Samosir, 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Impor					
a, ADHB (Miliar Rp)	798,58	883,22	1.029,09	1.072,66	1.103,08
b, ADHK (Miliar Rp)	729,68	758,66	775,62	749,31	701,54
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	34,94	34,68	36,26	34,12	32,04
Pertumbuhan ¹⁾					
Total Impor	7,50	10,60	16,52	4,23	2,84

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.15 di atas menunjukkan bahwa secara total nilai import barang dan jasa ADHB Kabupaten Samosir pada periode tahun 2012-2016 meningkat. Pada tahun 2012 nilai impor barang dan jasa mencapai 798,58 miliar rupiah kemudian meningkat sebesar 883,22 miliar rupiah pada tahun 2013, 1.029,09 miliar rupiah pada tahun 2014, 1.072,66 miliar rupiah pada tahun 2015 dan 1.103,08 miliar rupiah pada tahun 2016. Meskipun secara nominal nilai impor mengalami peningkatan, tetapi proporsinya terhadap PDRB cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2012, proporsinya terhadap PDRB sebesar 34,94% mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 32,04%.

Secara riil nilai impor mengalami peningkatan di tahun 2013 dengan pertumbuhan sebesar 10,60%. Selanjutnya terus mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 16,52% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 4,23%. Dan pada tahun 2016, impor kembali mengalami perlambatan dengan nilai 2,84%. Pertumbuhan impor pada tahun 2016 ini merupakan pertumbuhan dengan nilai terendah dalam rentang 5 tahun terakhir. Seperti yang digambarkan pada grafik 3.4.

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

**Grafik 3.4. Perkembangan Impor Barang dan Jasa ADHB,
Kabupaten Samosir, 2012 - 2016**



3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar Kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau

negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<http://samosirkab.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

MENURUT PENGELUARAN

KABUPATEN SAMOSIR

2012 – 2016

<http://samosirkab.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat angka PDRB ini menjelaskan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per-kapita Samosir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada tabel 4.1, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Samosir rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

**Tabel 4.1. PDRB dan PDRB Perkapita
Kabupaten Samosir, 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	2.285,89	2.546,77	2.838,07	3.143,84	3.442,97
- ADHK 2010	2.105,65	2.234,09	2.367,10	2.503,73	2.635,77
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	18,80	20,80	23,06	25,40	27,65
- ADHK 2010	17,31	18,24	19,23	20,22	21,17
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	5,35	5,38	5,42	5,15	4,68
Jumlah Penduduk (org)	121.613	122.449	123.065	123.789	124.496
Pertumbuhan	0,66	0,69	0,50	0,59	0,57

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan PDRB per-kapita secara "riil" mengalami peningkatan selama kurun waktu 2012-2016. PDRB Kabupaten Samosir ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016 dimana pada tahun 2012 sebesar 2.285,89 miliar rupiah menjadi 3.442,97 miliar rupiah pada tahun 2016. Begitu juga dengan PDRB ADHK 2010 pada tahun 2012 sebesar 2.105,65 miliar rupiah menjadi 2.635,77 miliar rupiah pada tahun 2016. Tahun 2016, PDRB perkapita tumbuh sebesar 4,68% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 5,35%. Tahun 2016, pertumbuhan penduduk sebesar 0,57% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 0,66%. Pertumbuhan penduduk mengalami perlambatan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2012.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam pengeluaran PDRB Kabupaten Samosir (sekitar 50%), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Samosir sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Kabupaten Samosir Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1.310,09	1.464,20	1.640,04	1.852,96	2.091,86
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	666,84	763,19	875,59	897,70	895,38
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,96	1,92	1,87	2,06	2,34

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,96 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai rasio relatif meningkat yaitu dalam rentang 1,96-2,34. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio PDRB terhadap impor merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar pengeluaran produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Samosir digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Samosir, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1.310,09	1.464,20	1.640,04	1.852,96	2.091,86
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	340,66	388,63	452,07	479,10	515,17
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	3,85	3,77	3,63	3,87	4,06

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB berfluktuatif, periode 2012 sampai 2014 cenderung menurun, dari sebesar 3,85 pada tahun 2012 menjadi 3,63 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 rasionya mengalami peningkatan menjadi 3,87 dan menjadi 4,06 pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena berfluktuasinya nilai investasi, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Samosir, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	1.310,09	1.464,20	1.640,04	1.852,96	2.091,86
b. LNPRT	52,43	58,43	66,50	72,15	79,29
c. Pemerintah	580,57	619,67	682,09	760,91	808,85
Jumlah	1.943,09	2.142,30	2.388,64	2.686,04	2.979,99
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.285,89	2.546,77	2.838,07	3.143,84	3.442,97
Proporsi	85,00	84,12	84,16	85,44	86,55

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2012 sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 84 %). Relatif sama dengan tahun berikutnya, proporsinya masih sekitar 84-86 %, meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang besar.

Dalam kurun waktu 2012 hingga 2016, proporsi terbesar terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 86,55%. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 84,12%.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB)
Kabupaten Samosir, 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	666,84	763,19	875,59	897,70	895,38
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	340,66	388,63	452,07	479,10	515,17
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,96	1,96	1,94	1,87	1,74

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada periode 2012-2016, secara umum ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB. Rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 1,96, sementara terendah tahun 2016 sebesar 1,74. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio PDRB terhadap impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari luar daerah. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi dan sebaliknya.

**Tabel 4.6. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Samosir, 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.285,89	2.546,77	2.838,07	3.143,84	3.442,97
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	798,58	883,22	1.029,09	1.072,66	1.103,08
Rasio PDRB terhadap Impor	2,86	2,88	2,76	2,93	3,12

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor kurun waktu 2012–2016 menunjukkan peningkatan yang relatif tetap. Rasio paling rendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 2,76, sementara yang tertinggi sebesar 3,12 terjadi pada tahun 2016. Hal ini lebih disebabkan peningkatan PDRB yang relatif lebih cepat dibandingkan peningkatan nilai impor. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Samosir, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.285,89	2.546,77	2.838,07	3.143,84	3.442,97
%	74,11	74,25	73,39	74,56	75,74
Total nilai Impor					
ADHB (Miliar Rp)	798,58	883,22	1.029,09	1.072,66	1.103,08
%	25,89	25,75	26,61	25,44	24,26
Total Permintaan					
Akhir¹ (Miliar Rp)	3.084,47	3.429,99	3.867,16	4.216,50	4.546,06
%	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Dari tabel 4.7, terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan daerah lain, dengan rentang 24,26-26,61%. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 73-75% dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun

¹ Termasuk diskrepansi statistik

waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 3.084,47 miliar pada tahun 2012 menjadi sebesar 4.546,06 miliar rupiah pada tahun 2016.

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik pada tahun 2012 sebesar 2.285,89 miliar rupiah; 2.546,77 miliar rupiah (2013); 2.838,07 miliar rupiah (2014) ; 3.143,84 miliar rupiah (2015); dan 3.442,97 miliar rupiah (2016). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 798,58 miliar rupiah (2012); 883,22 miliar rupiah (2013); 1.029,09 miliar rupiah (2014); 1.072,66 miliar rupiah (2015); dan 1.103,08 miliar rupiah (2016).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) serta dari daerah lain dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu daerah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kabupaten Samosir 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	666,84	763,19	875,59	897,70	895,38
Nilai Impor (ADHB)(Miliar Rp)	798,58	883,22	1.029,09	1.072,66	1.103,08
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	-131,73	-120,03	-153,50	-174,96	-207,70
Rasio ekspor thdp Impor	0,84	0,86	0,85	0,84	0,81

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012-2016 posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Samosir dengan daerah Kabupaten/Kota lain, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Samosir selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Defisit perdagangan Kabupaten Samosir yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan 2016 tercatat masing-masing sebesar 131,73 miliar rupiah (2012); 120,03 miliar rupiah (2013), 153,50 miliar rupiah (2014), 174,96 miliar rupiah (2015), dan 207,70 miliar rupiah (2016). Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung menurun dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 0,84 menjadi sekitar 0,81 pada tahun 2016.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 4.9. Rasio Perdagangan Internasional,
Kabupaten Samosir, 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	666,84	763,19	875,59	897,70	895,38
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	798,58	883,22	1.029,09	1.072,66	1.103,08
(X - M) (Miliar Rp)	-131,73	-120,03	-153,50	-174,96	-207,70
(X +M) (Miliar Rp)	1.465,42	1.646,41	1.904,67	1.970,37	1.998,46
R P I	-0,09	-0,07	-0,08	-0,09	-0,10

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012-2016, posisi ekspor LN selalu lebih rendah dari impor LN. Kecenderungan nilai ekspor LN pada periode tersebut cenderung meningkat dari 666,84 miliar rupiah pada tahun 2012 menjadi 895,38 miliar rupiah pada tahun 2016. Begitu pula dengan kecenderungan impor LN, yang mempunyai pola hampir sama dengan ekspor LN, cenderung meningkat setiap tahun.

Rasio Perdagangan Internasional Kabupaten Samosir pada periode 2012-2016 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan impor, karena dengan rasio yang minus antara 0,07 hingga 0,10.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana : I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.10. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Samosir, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	2.105,65	2.234,09	2.367,10	2.503,78	2.635,77
Perubahan Inventori (miliar rupiah)	132,11	133,45	149,90	152,07	153,26
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	316,30	336,96	349,55	361,42	372,69
ICOR	2,39	2,52	2,33	2,38	2,43

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 4.10 menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Samosir pada tahun 2012 sebesar 2,39, tahun 2013 sebesar 2,52, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 2,33 persen. Dan pada tahun 2015 hingga 2016, ICOR Kabupaten Samosir mengalami peningkatan, yaitu menjadi 2,38 dan 2,43.

<http://samosirkab.bps.go.id>

PENUTUP

<http://samosirkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2012-2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Samosir pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan atau antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan atau perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012-2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

-
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Samosir terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota lain.

<http://samosirkab.bps.go.id>

<http://samosirkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016

(Juta Rupiah)

No	Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015 [*]	2016 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.310.091,02	1.464.200,52	1.640.039,61	1.852.965,65	2.091.857,38
	a. Makanan Minuman dan Rokok	737.947,20	815.216,53	910.498,13	1.036.605,72	1.178.312,53
	b. Pakaian dan Alas Kaki	48.819,99	55.070,74	61.391,15	69.412,15	78.481,12
	c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	145.713,65	170.237,41	200.711,40	223.409,69	248.567,88
	d. Kesehatan dan Pendidikan	87.864,75	104.678,80	116.437,45	128.445,61	141.698,75
	e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	186.638,14	204.700,36	228.436,63	257.200,82	289.649,02
	f. Hotel dan Restoran	78.561,31	85.451,65	90.576,43	102.456,88	115.895,62
	g. Lainnya	24.545,98	28.845,03	31.988,42	35.434,78	39.252,45
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	52.434,28	58.426,57	66.505,40	72.155,89	79.286,46
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	580.573,57	619.673,81	682.091,95	760.914,79	808.846,42
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	340.665,44	388.631,32	452.068,38	479.099,60	515.172,80
	a. Bangunan	307.932,46	349.975,58	408.060,09	429.986,78	460.363,38
	b. Non-Bangunan	32.732,99	38.655,74	44.008,28	49.112,81	54.809,42
5	Perubahan Inventori	133.860,52	135.873,52	150.868,32	153.663,28	155.510,02
6	Ekspor	666.844,92	763.187,99	875.587,42	897.705,74	895.382,80
7	Impor	798.579,24	883.217,85	1.029.086,57	1.072.660,87	1.103.080,22
	PDRB	2.285.890,51	2.546.775,87	2.838.074,50	3.143.844,08	3.442.975,66

Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016

(Juta Rupiah)

No	Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015 ^(*)	2016 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.187.541,80	1.251.394,86	1.321.127,75	1.393.009,95	1.466.864,20
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	685.653,71	723.424,49	769.726,78	816.624,77	864.400,12
b.	Pakaian dan Alas Kaki	44.416,06	48.435,72	52.446,63	56.246,87	59.322,47
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	131.738,76	134.821,73	137.293,42	138.329,06	140.361,28
d.	Kesehatan dan Pendidikan	75.701,03	79.735,40	84.782,54	91.506,78	98.795,98
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	171.195,95	182.643,05	191.207,85	200.291,91	209.385,83
f.	Hotel dan Restoran	58.424,73	60.821,76	63.121,64	67.001,69	71.120,25
g.	Lainnya	20.411,57	21.512,71	22.548,87	23.008,87	23.478,26
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	49.280,48	53.577,63	56.955,42	57.903,23	60.090,80
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	520.131,04	533.308,52	549.283,12	584.002,09	594.915,58
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	316.299,66	336.956,17	349.548,93	361.418,78	372.691,71
a.	Bangunan	286.797,82	305.085,16	315.249,19	325.523,89	335.127,48
b.	Non-Bangunan	29.501,84	31.871,02	34.299,74	35.894,89	37.564,23
5	Perubahan Inventori	132.109,24	133.452,99	149.904,03	152.066,84	153.260,86
6	Ekspor	629.966,31	684.057,49	715.901,72	704.693,08	689.485,99
7	Impor	729.680,27	758.659,51	775.618,31	749.315,10	701.541,53
	PDRB	2.105.648,26	2.234.088,16	2.367.102,66	2.503.778,88	2.635.767,60

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016

No	Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015 ^(*)	2016 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,31	57,49	57,79	58,94	60,76
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	32,28	32,01	32,08	32,97	34,22
	b. Pakaian dan Alas Kaki	2,14	2,16	2,16	2,21	2,28
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,37	6,68	7,07	7,11	7,22
	d. Kesehatan dan Pendidikan	3,84	4,11	4,10	4,09	4,12
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,16	8,04	8,05	8,18	8,41
	f. Hotel dan Restoran	3,44	3,36	3,19	3,26	3,37
	g. Lainnya	1,07	1,13	1,13	1,13	1,14
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,29	2,29	2,34	2,30	2,30
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25,40	24,33	24,03	24,20	23,49
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,90	15,26	15,93	15,24	14,96
	a. Bangunan	13,47	13,74	14,38	13,68	13,37
	b. Non-Bangunan	1,43	1,52	1,55	1,56	1,59
5	Perubahan Inventori	5,86	5,34	5,32	4,89	4,52
6	Ekspor	29,17	29,97	30,85	28,55	26,01
7	Impor	34,94	34,68	36,26	34,12	32,04
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016

No	Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015 ^(*)	2016 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,40	56,01	55,81	55,64	55,65
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	32,56	32,38	32,52	32,62	32,80
	b. Pakaian dan Alas Kaki	2,11	2,17	2,22	2,25	2,25
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,26	6,03	5,80	5,52	5,33
	d. Kesehatan dan Pendidikan	3,60	3,57	3,58	3,65	3,75
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,13	8,18	8,08	8,00	7,94
	f. Hotel dan Restoran	2,77	2,72	2,67	2,68	2,70
	g. Lainnya	0,97	0,96	0,95	0,92	0,89
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,34	2,40	2,41	2,31	2,28
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24,70	23,87	23,20	23,32	22,57
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,02	15,08	14,77	14,43	14,14
	a. Bangunan	13,62	13,66	13,32	13,00	12,71
	b. Non-Bangunan	1,40	1,43	1,45	1,43	1,43
5	Perubahan Inventori	6,27	5,97	6,33	6,07	5,81
6	Ekspor	29,92	30,62	30,24	28,15	26,16
7	Impor	34,65	33,96	32,77	29,93	26,62
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016

No	Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015 [*]	2016 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	110,32	117,01	124,14	133,02	142,61
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	107,63	112,69	118,29	126,94	136,32
	b. Pakaian dan Alas Kaki	109,92	113,70	117,05	123,41	132,30
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	110,61	126,27	146,19	161,51	177,09
	d. Kesehatan dan Pendidikan	116,07	131,28	137,34	140,37	143,43
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	109,02	112,08	119,47	128,41	138,33
	f. Hotel dan Restoran	134,47	140,50	143,50	152,92	162,96
	g. Lainnya	120,26	134,08	141,86	154,00	167,19
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	106,40	109,05	116,77	124,61	131,94
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	111,62	116,19	124,18	130,29	135,96
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	107,70	115,34	129,33	132,56	138,23
	a. Bangunan	107,37	114,71	129,44	132,09	137,37
	b. Non-Bangunan	110,95	121,29	128,30	136,82	145,91
5	Perubahan Inventori	101,33	101,81	100,64	101,05	101,47
6	Ekspor	105,85	111,57	122,31	127,39	129,86
7	Impor	109,44	116,42	132,68	143,15	157,24
	PDRB	108,56	114,00	119,90	125,56	130,63

**Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik
Regional Bruto menurut Pengeluaran
Kabupaten Samosir, 2012-2016**

		(persen)				
No	Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015 [*]	2016 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,22	6,06	6,10	7,15	7,21
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,55	4,70	4,97	7,31	7,39
	b. Pakaian dan Alas Kaki	1,52	3,44	2,95	5,43	7,20
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,18	14,16	15,78	10,48	9,65
	d. Kesehatan dan Pendidikan	11,58	13,11	4,61	2,21	2,18
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,80	2,80	6,60	7,49	7,72
	f. Hotel dan Restoran	12,01	4,48	2,14	6,57	6,57
	g. Lainnya	9,48	11,50	5,80	8,56	8,56
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,63	2,49	7,08	6,72	5,88
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,51	4,10	6,87	4,92	4,35
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,09	7,09	12,13	2,50	4,28
	a. Bangunan	5,06	6,84	12,84	2,05	4,00
	b. Non-Bangunan	5,29	9,32	5,79	6,64	6,64
5	Perubahan Inventori	0,32	0,48	-1,15	0,40	0,41
6	Ekspor	0,69	5,40	9,62	4,16	1,94
7	Impor	2,33	6,37	13,97	7,89	9,84
	PDRB	3,98	5,01	5,18	4,73	4,03

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016

(persen)

No	Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,23	5,38	5,57	5,44	5,30
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,21	5,51	6,40	6,09	5,85
	b. Pakaian dan Alas Kaki	9,95	9,05	8,28	7,25	5,47
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,47	2,34	1,83	0,75	1,47
	d. Kesehatan dan Pendidikan	2,76	5,33	6,33	7,93	7,97
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,77	6,69	4,69	4,75	4,54
	f. Hotel dan Restoran	5,59	4,10	3,78	6,15	6,15
	g. Lainnya	5,67	5,39	4,82	2,04	2,04
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,23	8,72	6,30	1,66	3,78
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,77	2,53	3,00	6,32	1,87
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,70	6,53	3,74	3,40	3,12
	a. Bangunan	6,45	6,38	3,33	3,26	2,95
	b. Non-Bangunan	9,16	8,03	7,62	4,65	4,65
5	Perubahan Inventori	68,48	1,02	12,33	1,44	0,79
6	Ekspor	(1,29)	8,59	4,66	(1,57)	(2,16)
7	Impor	5,05	3,97	2,24	(3,39)	(6,38)
	PDRB	6,05	6,10	5,95	5,77	5,27

Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran Kabupaten Samosir, 2012-2016

(persen)

No	Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015 [*]	2016 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,98	3,03	3,12	3,04	2,95
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,39	1,79	2,07	1,98	1,91
	b. Pakaian dan Alas Kaki	0,20	0,19	0,18	0,16	0,12
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,52	0,15	0,11	0,04	0,08
	d. Kesehatan dan Pendidikan	0,10	0,19	0,23	0,28	0,29
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,55	0,54	0,38	0,38	0,36
	f. Hotel dan Restoran	0,16	0,11	0,10	0,16	0,16
	g. Lainnya	0,06	0,05	0,05	0,02	0,02
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,12	0,20	0,15	0,04	0,09
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,43	0,63	0,72	1,47	0,44
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,00	0,98	0,56	0,50	0,45
	c. Bangunan	0,88	0,87	0,45	0,43	0,38
	d. Non-Bangunan	0,12	0,11	0,11	0,07	0,07
5	Perubahan Inventori	2,70	0,06	0,74	0,09	0,05
6	Ekspor	-0,42	2,57	1,43	-0,47	-0,61
7	Impor	1,77	1,38	0,76	-1,11	-1,91
	PDRB	6,05	6,10	5,95	5,77	5,27

DAFTAR PUSTAKA

<http://samosirkab.bpt.go.id>

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir, PDRB Menurut Pengeluaran, berbagai seri, Medan.
2. _____, *Samosir Dalam Angka*, berbagai seri, Medan.
3. Badan Pusat Statistik, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
6. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
12. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
13. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
14. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
15. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
16. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
17. *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
18. *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
19. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

-
20. , *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
 21. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
 22. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<http://samosirkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SAMOSIR**

BPS-Statistics of Samosir Regency

Kompleks Perkantoran Pemkab Samosir Blok A
Desa Siopat Sosor Parbaba - Pangururan 22392
Telp. : 0626-2222490 Fax : 0626-2222491

E-mail : bps1217@bps.go.id Website : <http://samosirkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-6860-31-6



9 786026 860316